MANAJEMEN KAS

A. PENGERTIAN KAS

Ada banyak sekali pengertian tentang kas, baik dari sisi perundang-undangan maupun dari sisi teori/konsep ekonomi.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara

Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue Manajemen Kas Sektor Publik 3 Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan olehMenteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Dengan demikian kas dalam pengertian undang-undang ini semua uang negara yang bersumber dari seluruh penerimaan negara dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.

2. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat.

3. Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Kas terdiri dari saldo kas *(cash on hand)* dan rekening giro setara kas *(cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi saham tersebut adalah setara kas. Sebagai contoh, saham preferen yang dibeli dan akan segera jatuh tempo serta tanggal penebusan *(redemption date*) telah ditentukan.

Pinjaman bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan. Namun demikian, cerukan *(bank overdraft*) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas perusahaan. Dalam keadaan tersebut, cerukan termasuk komponen kas dan setara kas. Karakteristik dari pengaturan perbankan tersebut timbulnya fluktuasi saldo bank dari positif ke *overdraft.*

Arus kas tidak mencakupi mutasi di antara pos-pos yang termasuk dalam kas atau setara kas, karena komponen tersebut lebih merupakan bagian dari pengelolaan kas perusahaan dan bukan sebagai bagian dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengertian kas meliputi saldo kas *(cash on hand)*, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan serta instrumen investasi yang sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yangsignifikan.

B. MOTIF DALAM MENYIMPAN KAS

Terdapat tiga motif dasar1 dalam menyimpan kas yaitu:

1. Motif Bertransaksi *(Transactions Motive)*

Motif ini melihat kas secara sempit yaitu sebagai media untuk pertukaran dalam rangka membiaya transaksi normal yang terjadi seperti pembayaran kepada pemasok dan pembayaran gaji. Besarnya tingkat saldo transaksi tergantung pada besar kecilnya organisasi dan periode waktu kas masuk dan kas keluar.

Organisasi yang besar pada umumnya cenderung melakukan banyak transaksi. Jika arus kas masuk dan keluar dapat disinkronisasi maka saldo kas dapat diminimalisasi.

2. Motif Berjaga-Jaga *(Precautionary Motive*)

Motif ini fokus pada kemampuan kas untuk menunjang daya beli pada saat timbul kejadian yang tidak diharapkan atau peluang yang tidak diperkirakan sebelumnya. Saldo untuk pencegahan berfungsi sebagai cadangan pada saat ketidakpastian meningkat sebagai akibat perubahan industri, ekonomi, dan dunia. Saldo untuk keperluan darurat ini umumnya disediakan dengan menggunakan portofolio dari pasar uang dan pasar modal. Kriteria kunci dari penggunaan metode ini adalah tingkat keamanan yang tinggi, likuiditas, dan kemudahan untuk mencairkan surat berharga menjadi kas.

3. Motif Spekulasi *(Speculative Motive*)

Motif ini timbul seiring dengan keinginan manajemen untuk memiliki sejumlah kas yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang timbul secara tidak terduga. Manajemen harus mempunyai prediksi bahwa saldo kas tersebut dapat

menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari operasi normal organisasi. Pada umumnya, organisasi-organisasi tidak menyimpan kas untuk tujuan spekulasi.

C. PROSES KAS *(Cash Cycle)*

Proses arus kas *(cash cycle*) adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses dari pengeluaran kas sampai dengan penerimaan kas. George W Galinger dan P. Basil Healey, *Liquidity Analysis and Management*, Edisi ke-2 (Massachussets: Aldison-Wesley Publishing, 1991), hal 236 Konsep-konsep, Unsur-unsur dan Current Issue Manajemen Kas Sektor Publik Gambar 1.1 Proses Arus Kas

Proses ini merupakan bagian dari proses operasional *(operating cycle*). Proses operasional terdiri dari empat komponen, yaitu peridode persediaan, periode utang, periode piutang dan siklus kas. Pada umumnya periode persediaan ditambah dengan periode utang akan sama dengan periode utang dan siklus kas. Akan tetapi persamaan ini tidak berlaku untuk pendapatan pemerintah dari perpajakan karena pendapatan ini tidak terkait dengan layanan yang diberikan pemerintah.

D. DEFINISI dan TUJUAN KAS

Manajemen kas adalah pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi. Manajemen kas memberikan kepada manajemen alat untuk berfungsinya suatu organisasi dengan menggunakan kas atau sumber daya likuid yang dimilikinya dengan cara yang tepat. Mike Williams (2004) mendefinisikan manajemen kas pemerintah sebagai strategi dan proses-prosesnya untuk mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintahan maupun antara pemerintah dengan sektor-sektor lain. Dari definisi iniada beberapa hal yang ditekankan:

1. Definisi ini mencakup persoalan kebijakan dan rancangan proses-proses yang lebih seragam.
2. Manajemen arus kas dan saldo kas memunculkan berbagai tantangan yang berbeda-beda yang harus dihadapi secara bersama-sama.
3. Definisi ini mencakup manajemen kas pada sektor pemerintahan dan interaksi antara pemerintah dengan sektor-sektor lain, terutama sector keuangan.

Sementara itu, Storkey (2001) mendefinisikan manajemen kas sebagai “memiliki uang yang cukup pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah dalam cara yang efektif dan efisien.

Dari definisi di atas, terdapat beberapa tujuan dari manajemen kas. Tujuan utamanya adalah dengan manajemen kas yang baik, suatu pemerintahan dapat Manajemen Kas mendanai pengeluaran-pengeluarannya tepat pada waktunya dan memenuhi setiap kewajibannya ketika jatuh tempo. Tujuan-tujuan tambahannya adalah efektivitas biaya, pengurangan risiko dan efisiensi. Secara khusus, Williams (2004) menyatakan tujuan-tujuan dari manajemen kas pemerintah yang efisien adalah:

1. Menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan dan menekan seminimal mungkin biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo tersebut pada sistem perbankan.
2. Mengurangi risiko operasional, risiko kredit dan risiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah.
3. Menambah fleksibilitas dalam cara pemerintah menentukan kapan penerimaan kas pemerintah ditandingkan dengan pengeluaran kas pemerintah.
4. Mendukung kebijakan-kebijakan keuangan lainnya.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di Indonesia, tujuan-tujuan manajemen kas dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian berikut:

1. Manajemen likuiditas

Manajemen likuiditas penting untuk memastikan negara memiliki kas yang cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban yang jatuh tempo. Untuk itu pemerintah perlu mengetahui berapa besar penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan.

a. Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara

. Pemerintah perlu mengetahui berapa besar pengeluaran kas yang akan dilakukan. Beberapa pengeluaran pemerintah mungkin saja dapat ditunda atau dipercepat, pemerintah harus mampu melihat saat pengeluaran kas yang menguntungkan pemerintah.

Penerimaan kas negara seluruhnya harus segera disetor (Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 16). Penerimaan negara yang tidak segera disetor akan menguntungkan penyetor atas biaya pemerintah.

b. Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas

Kekurangan/kelebihan kas akan membebani keuangan pemerintah karena adanya *time value of money*.

2. Minimalisasi kas yang menganggur *(idle cash)*

a. Pemanfaatan kas secara maksimal untuk memperoleh keuntungan (yield)

. Sesuai dengan UU. No.1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara pada pasal 24 dinyatakan bahwa pemerintah berhak untuk mendapatkan bunga/jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum maupun bank sentral, bunga/jasa giro yang diperoleh didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku.

. Pemerintah juga dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut dapat berupa saham, surat utang dan investasi langsung (pasal 41, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

Pembelian kembali *(Buy back)* Surat Utang Negara (SUN). Pembelian kembali SUN akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan beban bunga yang harus dibayar oleh pemerintah.

b. Mengurangi cost of financing

Jika negara mempunyai manajemen kas yang baik negara dapat melakukan penundaan penerbitan SUN dengan membiayai pengeluaran-pengeluaran dari kas yang berasal dari pendapatan yang ada atau melakukan *buy back* SUN untuk mengurangi pembayaran beban bunga.

3. Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah

a. Mengurangi jumlah bank accounts pemerintah

Banyaknya rekening pemerintah yang tersebar di berbagai bank menimbulkan biaya tinggi untuk memelihara rekening tersebut. Selain itu tersebarnya rekening mengkibatkan semakin banyaknya '*idle cash*'

b. Mengurangi biaya revenue collection dan expenditure processing (administration of payment process)

Manajemen kas akan merestrukturisasi cara-cara pengumpulan pendapatan pemerintah sebagai contoh banking arragement mengenai saat penyetoran oleh bank persepsi dan renumerasi yang diberikan atau yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada bank persepsi. Restrukturisasi tersebut perlu agar penerimaan negara dapat masuk ke rekening kas umum negara sesegera mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Demikian pula dengan pemrosesan pengeluaran. Pemrosesan pengeluaran perlu dilakukan dengan se-efisien dan secepat mungkin, misalnya dengan menggunakan fasilitas perbankan. Jika hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka manfaat lain yang didapatkan adalah minimalisasi terjadinya penyelewengan keuangan negara.

Manajemen kas sektor publik meliputi empat elemen2 antara lain: perencanaan *(forecasting)*, mobilisasi dan manajemen arus kas *(mobilizing and managing the cash flow)*, pemeliharaan

hubungan dengan perbankan *(maintaining banking relations*), dan investasi kelebihan kas *(investing surplus cash*). Setiap elemen harus dikelola secara aktif untuk mencapai efektifitas manajemen kas.

E. MODEL EKONOMI MANAJEMEN KAS

Perhitungan target saldo kas menyangkut *trade-off* antara *opportunity cost* memiliki kas terlalu banyak dan *trading cost* (biaya mengubah investasi jangka pendek menjadi kas) karana memiliki kas terlalu sedikit. Model manajemen kas berusaha menjawab permasalahan pembagian aset likuid suatu organisasi antara kas atau surat berharga. Jika suatu organisasi memiliki saldo kas terlalu rendah, organisasi tersebut akan menjual surat-surat berharganya (dan mungkin akan membeli surat berharga lagi untuk mengganti surat berharga yang telah dijual) lebih sering daripada jika saldo kasnya lebih tinggi. Dengan demikian, *trading cost*-nya cenderung akan turun ketika saldo kas bertambah besar. Sebaliknya, *opportunity cost* dari memiliki kas bertambah sejalan dengan peningkatan saldo kas.

1. Model Baumol

William Baumol (1952) adalah ekonom pertama yang menjabarkan model formal dari manajemen kas dengan memasukkan *opportunity costs* dan *trading costs.*Modelnya digunakan untuk menentukan target saldo kas.

Misalnya Pemda Jakarta Tenggara memulai kegiatannya dengan saldo kas sebesar C = Rp. 12.000.000.000, dan pengeluarannya akan melebihi penerimaannya sebesar Rp. 6.000.000.000 setiap minggunya. Saldo kasnya akan menjadi nol pada akhir minggu kedua, dan saldo kas rata-ratanya akan sebesar C/2 = Rp. 12.000.000.000/2 = Rp. 6.000.000.000 selama periode dua minggu tersebut. Pada akhir minggu kedua, Pemda Jakarta Tenggara harus mengisi saldo kasnya dengan menjual SBI yang dimilikinya atau meminjam.

Jika C ditetapkan terlalu tinggi, misalnya Rp. 24.000.000.000, kas akan habis dalam jangka waktu empat minggu sebelum perusahaan harus menjual surat-surat berharganya, akan tetapi saldo kas rata-rata Pemda akan meningkat menjadi Rp. 12.000.000.000 (dari Rp. 6.000.000.000). Jika C ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000, kas akan habis dalam jangka waktu satu minggu dan Pemda Jakarta Tenggara harus mengisi kasnya lebih sering lagi, tetapi saldo kas rata-ratanya akan turun dari Rp. 6.000.000.000 menjadi Rp. 3.000.000.000.

Karena biaya transaksi (*trading costs*) harus dikeluarkan setiap kali kas diisi (misalnya, biaya pialang penjualan SBI), penetapan saldo kas awal yang besar akan menurunkan *trading cost* yang terkait dengan manajemen kas. Akan tetapi, semakin besar saldo kas rata-rata, semakin

besar pula *opportunity cost*-nya (yaitu penghasilan yang dapat diperoleh jika kas diubah menjadi SBI).

Model Baumol memberikan kontribusi yang penting bagi manajemen kas. Keterbatasan-keterbatasan model ini adalah:

a. *Model ini mengasumsikan bahwa organisasi memiliki tingkat pengeluaran yang konstan.*
b. *Model ini mengasumsikan bahwa tidak ada penerimaan kas selama periode proyeksi.*
c. *Tidak ada persediaan pengaman (safety stock).*

2. Model Miller-Orr

Merton Miller dan Daniel Orr mengembangkan model saldo kas dalam keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar berfluktuasi secara random setiap hari. Dalam model Miller-Orr, baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas diikutsertakan. Model ini mengasumsikan bahwa arus kas bersih harian (arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar) terdistribusi secara normal. Pada setiap hari, arus kas bersih dapat berupa nilai yang diharapkan *(expected value)* ataupun nilai yang lebih tinggi atau nilai yang lebih rendah. Dalam analisis ini diasumsikan nilai yang diharapkan besarnya nol.

Seperti model Baumol, model Miller-Orr bergantung pada *trading costs* dan opportunity costs. Biaya per transaksi menjual atau membeli sekuritas, F, diasumsikan berjumlah tetap. Persentase opportunity cost memegang kas, K, adalah tingkat bunga (pengembalian) harian dari sekuritas atau surat berharga yang disimpan. Akan tetapi, tidak seperti model Baumol, jumlah transaksi per periode adalah variabel acak yang bervariasi dari satu periode ke periode lainnya, bergantung pada pola arus kas masuk dan arus kas keluar. Sebagai konsekuensinya, trading costs untuk setiap periode bergantung pada jumlah transaksi yang diharapkan dalam sekuritas atau surat berharga selama periode tersebut. Demikian juga, opportunity cost dari memegang kas adalah fungsi dari saldo kas yang diharapkan setiap periode.

Untuk dapat menggunakan model Miller-Orr, manajemen harus melakukan empat hal, yaitu:

a. Menetapkan batas kendali bawah untuk saldo kas. Batas bawah ini dapat berhubungan dengan marjin pengaman minimum yang ditetapkan oleh manajemen.
b. Mengestimasikan deviasi standar dari arus kas harian.

c. Menentukan tingkat bunga.
d. Mengestimasikan biaya trading membeli dan menjual sekuritas atau surat berharga.

Keempat langkah ini akan memungkinkan batas atas dan titik kembali dihitung. Miller dan Orr menguji model mereka menggunakan data sembilan bulan dari suatu perusahaan industri yang besar. Model ini mampu menghasilkan saldo kas harian rata-rata yang jauh lebih rendah daripada yang digunakan perusahaan.

Model Miller-Orr memperjelas persoalan dalam manajemen kas. Pertama, model ini menunjukkan bahwa titik kembali terbaik, Z*, berhubungan secara positif dengan trading costs, F, dan berhubungan negatif dengan K. Temuan ini konsisten dan analogis dengan model Baumol. Kedua, model Miller-Orr menunjukan bahwa titik kembali terbaik dan saldo kas rata-rata terkait secara positif dengan variabilitas arus kas. Ini berarti, organisasi yang arus kasnya memiliki ketidakpastian yang lebih besar harus memegang saldo kas rata-rata yang juga lebih besar.

3. Faktor-Faktor Lain yang Mempengaruhi Saldo Kas yang Ditargetkan Pinjaman

Perusahaan memperoleh kas dengan cara menjual surat berharga. Alternatif lain yang dapat digunakan adalah dengan meminjam kas. Pinjaman memunculkan tambahan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kas, yaitu:

a. Pinjaman akan lebih mahal daripada menjual sekuritas karena tingkat bunganya akan jauh lebih tinggi.
b. Kebutuhan untuk meminjam akan bergantung pada keinginan manajemen untuk memegang kas dalam jumlah kecil.

Organisasi yang akan lebih besar kemungkinannya meminjam untuk menutupi pengeluaran kas tak terduga adalah organisasi yang memiliki variabilitas arus kas yang besar dan memiliki sedikit investasi dalam surat berharga.

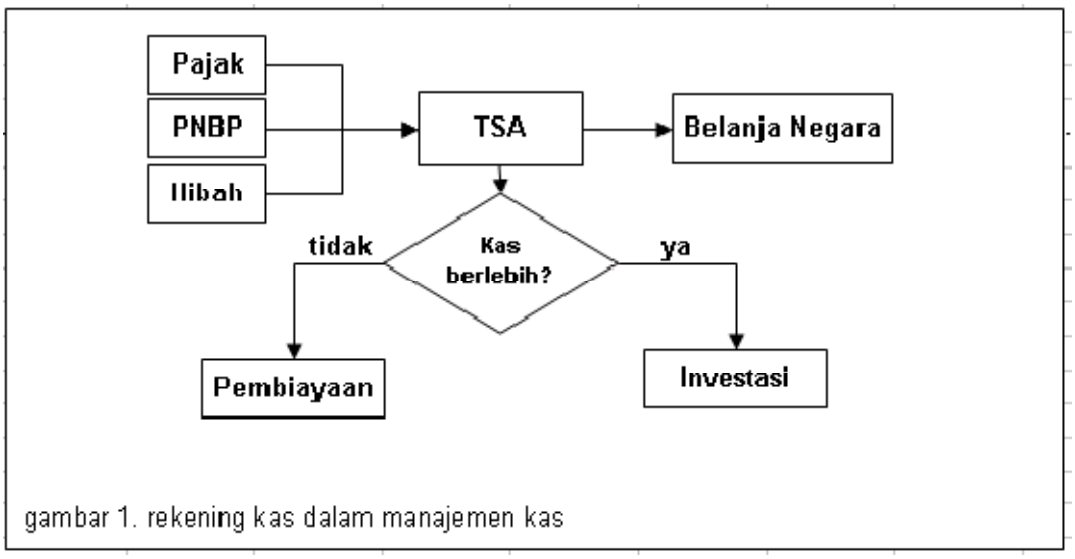
F. PENGELOLAAN PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS

a. Sistem Rekening Kas dan Persediaan Kas

Keberadaan rekening ini adalah sangat penting sebagai lumbung kas negara sehingga memudahkan kontrol atas keluar masuknya kas. Dengan adanya rekening kas negara maka ketersediaan kas pada periode tertentu dapat dengan cepat dimonitor.

Penggunaan rekening kas dapat bervariasi dari berbagai negara. Rekening dapat dibentuk secara tersentralisasi pada satu rekening yang dikuasai oleh otoritas perbendaharaan atau terdesentralisasi pada rekening departemen atau unit

Untuk meminimal biaya pinjaman atau memaksimalkan penghasilan bunga tabungan, maka saldo operasi kas harus ditekan pada tingkat minimum. Pada Negara yang menggunakan sistem *imprest fund* dalam penyaluran dananya, departemen atau unit pengguna dana terkadang mengakumulasikan sejumlah besar dana menganggur pada rekening bank departemen atau unit mereka. Dana ini meningkatkan kebutuhan pemerintah atas pinjaman untuk membiayai pembayaran atas suatu unit walaupun sebenarnya unit lain memiliki dana berlebih yang tidakdigunakan. Pembentukan rekening kas suatu negara harus dapat menjamin ketersediaan informasi *real-time* mengenai saldo kas. Sehingga dapat segera diambil keputusan mengenai apakah meminjam kas untuk memenuhi kebutuhan operasi atau menginvestasikan kas untuk mengatasi kelebihan dana yang menganggur. Gambar berikut memberikan ilustrasi mengenai pentingya rekening kas dalam mengelola kas.



gambar 1. rekening kas dalam manajemen kas

Oleh sebab itu, preferensi atas penggunaan sistem rekening kas pada beberapa negara lebih cenderung pada penggunaan rekening kas yang tersentralisasi *(treasury single account*) daripada rekening terdesentralisasi *(decentralised account*) terutama bagi negara yang

menekankan peningkatan kontrol fiskal dan keuangan. Banyaknya rekening kas negara dapat membawa akibat yang tidak baik dalam pengelolaan kas.

Treasury Single Account (TSA) adalah sebuah rekening atau sekumpulan rekening yang berhubungan di mana pemerintah menggunakannya dalam melakukan pembayaran atas tagihan-tagihannya.

Jadi TSA merupakan suatu rekening yang dipergunakan untuk menyimpan uang negara, menampung semua penerimaan negara dan sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara. Rekening ini pada umumnya terdapat pada Bank Sentral.

Dalam hal terdapat serangkaian rekening, rekening utama berada pada Bank Sentral.

Dalam praktiknya dari sisi pengeluaran, TSA dilakukan dengan berbagai variasi metode untuk sentralisasi transaksi dan arus kas pada beberapa negara. Namun secara umum hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu3:

1. *Tresury Single Account and Centralized Accounting Control*;

Dalam sistem ini permintaan pembayaran dari departemen atau unit pengguna dana diserahkan pada otoritas perbendaharaan yang mengontrol dan merencanakan pembayarannya. Otoritas perbendaharaan mengelola *float* atas tagihan yang belum dibayar.

2. *Passive Treasury Single Account*;

Dalam sistem ini pembayaran dilakukan langsung oleh departemen atau unit pengguna dana, namun melalui sebuah *Treasury Single Account*. Otoritas perbendaharaan, atau aturan penggunaan anggaran, mengatur batas kas atas jumlah transaksi yang diperbolehkan namun tidak mengontrol transaksi secara individual.

Dari sisi penerimaan, TSA menyediakan informasi saldo kas yang *up-to-date* setiap harinya. Hal ini dimungkinkan karena setiap penerimaan negara baik pajak maupun non-pajak akan terakumulasi pada satu rekening kas negara yang terdapat pada Bank Sentral. Dalam hal rekening penerimaan dilakukan oleh Bank Umum, maka untuk mengurangi *float* atas penerimaan tersebut saldo pada rekening tersebut sesegera mungkin ditransfer ke rekening utama, biasanya dilakukan setiap hari.

Penggunaan *Treasury Single Account* akan dikatakan efektif apabila pencapaian kondisi sebagai berikut terpenuhi:

1. Tidak ada *float* penerimaan dan pengeluaran *Float* merupakan interval waktu yang dibutuhkan antara antara penyerahan penerimaan (kas) sampai penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan, atau penyerahan tagihan sampai tagihan tersebut terbayar. Jadi *float* dapat berlaku baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Efek buruk dari adanya float dari sisi penerimaan adalah bahwa saldo kas tidak merepresentasikan saldo sebenarnya karena saldo

yang terdapat pada kas negara belum termasuk saldo penerimaan yang masih terdapat pada bank umum dan saldo ini merupakan asset yang menganggur. Akibat lanjutan dari hal tersebut adalah keseimbangan kas negara terganggu sehingga timbul pinjaman yang tidak diperlukan atau penundaan investasi.

2. Rekening penampung sementara *(transit accounts)* harus dinihilkan setiap hari untuk mendukung percepatan penerimaan negara dibentuk rekening khusus pada bank umum setempat yang ditunjuk untuk menampung penerimaan tersebut. Hal ini dilakukan juga karena bank sentral biasanya tidak melayani masyarakat umum dalam bertransaksi. Rekening ini bersifat sementara. Praktik terbaik untuk rekening ini adalah bahwa saldo rekening ini harus dinihilkan setiap hari. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan atau bahkan mengeliminasi *float* atas penerimaan negara.

b.. Sistem Pengeluaran Kas

Sesaat setelah anggaran belanja negara disahkan oleh legislatif maka pengeluaran untuk membiayai operasional departemen atau unit pengguna dana dapat dilakukan. kas dikeluarkan dari rekening kas negara mengikuti siklus pengeluaran sebagai berikut:

- Alokasi appropriasi dan allotment/pelepasan dana pada departemen atau unit pengguna dana.

Tahap ini merupakan tahap penganggaran di mana dokumen anggaran dibuat untuk tiap departemen dan unit pengguna dana yang dibiayai oleh Negara. Appropriasi merupakan alokasi anggaran pada departemen/lembaga, sedangkan *allotment* merupakan alokasi dari departemen/lembaga kepada unit-unit dibawahnya. Pada tahap ini dapat diberikan langsung pada masing-masing pengguna dana, secara penuh atau memakai sistem *imprest fund.* Namun demikian hal ini bisa berakibat buruk bagi likuiditas saldo kas secara keseluruhan, karena banyaknya uang menganggur pada rekening departemen/lembaga tersebut.

- Pembuatan komitmen

Tahap pembuatan komitmen adalah tahap di mana kewajiban membayar dimasa yang akan datang telah timbul. Tahap ini ditandai dengan penandatangan kontrak, pemesanan barang dan jasa, dan lain sebagainya.

Dalam pembuatan komitmen harus dipastikan bahwa tidak dilakukan pembayaran dimuka. Termin dalam komitmen harus dipastikan untuk menyebutkan pembayaran akan dilakukan setelah barang atau jasa diterima, atau apabila pekerjaan tersebut membutuhkan waktu yang panjang, pembayaran dilakukan berdasarkan prosentase penyelesaian pekerjaan.

- Akuisisi barang atau jasa/verifikasi

Tahap ini ditandai dengan penyerahan barang atau jasa yang disepakati.

Atas penerimaan barang atau jasa, otoritas pengguna barang wajib memeriksa apakah spesifikasi yang disepakati sesuai dengan kenyataan. Apabila tidak, hal ini merupakan kewenangan pengguna barang untuk menolak membayar atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pada tahap ini bila barang dan jasa telah sesuai dengan kontrak atau pesanan yang maksudkan, maka dibuat sebuah berita acara serah terima atau dokumen yang dapat dipersamakan. Berita acara ini merupakan dasar untuk membayar tagihan yang disampaikan oleh suplier.

Pembayaran

Tahap ini merupakan pelunasan atas tagihan yang disampaikan pada tahap sebelumnya. Pelaksanaan pelunasan dapat dilakukan dengan pembayaran secara tunai, cek, transfer antar bank, pengeluaran surat hutang, barter, pengurangan atas kewajiban pajak, memakai voucher kas dan lain sebagainya. Pelunasan dengan barter dan pengurangan kewajiban pajak mungkin merupakan cara pelunasan yang jarang dilakukan. Pemakaian voucher kas di lain pihak tidak dapat dikatan sebagai pelunasan melainkan sebagai rangkaian dari tahap ini, karena saat voucher dikeluarkan tidak berarti kas sudah dikeluarkan dari TSA.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa secara umum sebuah pengeluaran dapat dimintakan pembayaran atas beban negara apabila terpenuhi ketentuan mengenai ketersediaan dana *(appropriasi*), adanya komitmen berupa kontrak atau pesanan, dan adanya bukti penyerahan barang dan jasa sesuai kontrak atau pesanan. Oleh karenanya, setiap unsur pada tahapan tersebut harus terdapat dalam penyampaian tagihan pada negara. Pada kasus tertentu tahap komitmen dan akuisisi/verifikasi sulit dibedakan atau bahkan dapat dikatakan keduanya tergabung, misalnya pembayaran pengeluaran pegawai (gaji, tunjangan dan lain-lain), dan pengeluaran daya dan jasa (telepon, listrik dan gas). Komitmen pada jenis pengeluaran ini tidak harus diwakilkan dengan adanya kontrak, namun dengan adanya tagihan atas nama pengguna dana maka tagihan tersebut perlu untukmendapatkan pembayaran.

Otoritas perbendaharaan berkewenangan untuk membuat peraturan mengenai pembentukan *petty cash* tersebut.

Kemungkinan kedua adalah pembayaran dilakukan langsung oleh departemen atau unit pengguna dana, namun melalui sebuah *Treasury Single Account*. Otoritas perbendaharaan, atau aturan penggunaan anggaran, mengatur batas kas atas jumlah transaksi yang diperbolehkan namun tidak mengontrol transaksi secaraindividual. Dengan kata lain otoritas perbendaharaan berfungsi sebagai kasir untuk membayarkan tagihan yang telah diverifikasi

oleh departemen atau unit pengguna dana. Jadi segala penjadwalan manjadi kewenangan departemen atau unit pengguna dana.

Kemungkinan tersebut di atas merupakan generalisasi dari praktik dibeberapa negara, dalam pelaksanaanya terdapat suatu negara mungkin melakukan variasi yang tidak persis sama dengan kedua kemungkinan tersebut.

c. Hubungan dengan Sektor Perbankan

Peranan perbankan untuk mendukung tercapainya managemen kas yang efektif adalah sangat besar. Penggunaan rekening bank memungkinkan *float* atas penerimaan dan pengeluaran dapat ditekan pada titik minimal. Peminimalan *float* ini tidak terlepas dengan tekhnologi yang digunakan perbankan saat ini yang sudah memadai, di mana tranfer dapat dilakukan dalam hitungan detik.

Dari sisi penerimaan, konsep TSA menginginkan semua penerimaan ditransferke rekening kas negara di bank sentral setiap harinya. Praktik di Indonesia, penerimaan ini akan ditransfer ke rekening kas negara di bank sentral dua kali seminggu, yaitu selasa dan jum'at, dan akhir bulan bersangkutan. Hal ini jelas terdapat *float* dalam penerimaan, di mana kas yang terkumpul pada bank persepsi tidak segera disetorkan kepada rekening kas negara. Adanya *timelag* yang ada menguatkan kemampuan perbankan untuk memberikan kredit, namun di lain pihak kemampuan negara untuk memenuhi pembayaran atas tagihan.

Penyetoran tiap hari kepada kas negara akan menghilangkan kemampuan perbankan dalam memberikan kredit dan memposisikannya sebagai agen pengumpul penerimaan. Hal ini akan menjadi biaya tersendiri bagi perbankan sehingga mengurangi semangat perbankan untuk menjadi bank persepsi. Untuk itu formula mengenai insentive yang akan diberikan kepada perbankan harus dibuat untuk mendukung kegiatan ini.

Pengurangan atas *float* dari sisi pengeluaran dapat juga dikurangi sebagaimana dilakukan pada sisi penerimaan. Pembayaran tagihan atas pengeluaran departemen atau unit pengguna dapat langsung dibayarkan sesaat setelah SP2D dikeluarkan oleh KPPN sebagai otoritas perbendaharaan. Proses yang perlu dipercepat adalahpemrosesan pembayaran itu sendiri yang terjadi pada departemen atau unit pengguna dana dan pada otoritas perbendaharaan.

G. PRINSIP-PRINSIP PENGENDALIAN PENERIMAAN KAS

Beberapa instansi pemerintah mungkin hanya menerima kas yang bersumber dari alokasi anggaran dan tidak mendapatkan pembayaran langsung dari pelanggannya, yaitu masyarakat atas jasa yang diberikannya, sementara beberapa instansi lain menerima kas dari pelanggan.

1. **Pengendalian dalam Sistem Penerimaan Kas Tunai**

Beberapa entitas di sektor publik, tertutama yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), mungkin melakukan aktivitas (bisnis) menjual barang/jasa layaknya entitas sektor swasta. Pada entitas yang demikian tentu dapat diterapkan pengendalian intern yang tidak berbeda dengan entitas sektor swasta.

Pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dapat didesain dengan mengembangkan prinsip-prinsip dalam komponen aktivitas pengendalian sehingga menjadi lebih spesifik. Aktivitas pengendalian dalam system penerimaan kas dari penjualan tunai:

a. Pemisahan tugas yang cukup

1) ***Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas***. Fungsi penjualan yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas yang merupakan fungsi penyimpanan. Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas dari penjualan tunai dilaksanakan oleh dua fungsi yang saling mengecek.

2) ***Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi***. Fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain yaitu: fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi.

3) ***Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi penyerahan barang, dan fungsi akuntansi.*** Tidak ada transaksi penjualan tunai yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh salah satu fungsi tersebut. Dengan dilaksanakannya setiap transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut akan tercipta adanya pengecekkan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya.

b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas; dan dokumen dan catatan yang memadai

1) ***Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai.*** Faktur penjualan tunai harus diotorisasi oleh fungsi penjualan agar menjadi dokumen yang sahih, yang dapat dipakai sebagai dasar bagi fungsi penerimaan kas untuk menerima kas dari pembeli, dan dapat dipakai sebagai perintah bagi fungsi penyerahan barang untuk menyerahkan kepada pembeli setelah harga barang tersebut dibayar, serta sebagai dokumen sumber untuk pencatatandalam catatan akuntansi.

2) ***Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap ”lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut.*** Sebagai bukti bahwa fungsi penerimaan kas telahmenerima kas dari pembeli, fungsi tersebut harus membubuhkan cap ”lunas” dan menempelkan pita register kas pada faktur penjualan

tunai. Dengan demikian, dokumen tersebut dapat memberikan otorisasi bagi fungsi penyerahan barang untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

3) ***Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit.*** Hal yang harus dipastikan dalam pembayaran dengan kartu kredit adalah bonafiditas pemegang kartu kredit. Dalam sistem *on line*, otorisasi dapat dilakukan dengan bantuan suatu alat yang dihubungkan dengan komputer bank penerbit kartu kredit. Jika bukan sistem *on line* yang digunakan, maka dapat dilakukan pengecekkan dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit.

4) ***Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi penyerahan barang dengan cara membubuhkan cap, misalnya "sudah diserahkan", pada faktur penjualan tunai.*** Dengan cara tersebut, fungsi akuntansi akan mendapat bukti yang sahih untuk mencatat transaksi penjualan.

5) ***Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai.*** Hal ini dimaksudkan agar setiap pemutakhiran *(up date)* catatan akuntansi dapat dimintakan pertanggungjawabanya ke pada personil tertentu yang berwenang melakukan pencatatan tersebut. Selain itu, tanda pada faktur tersebut juga untuk mencegah suatu transaksi dicatat lebih dari satu kali.

6) ***Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakainya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.*** Faktur yang bernomor urut tercetak merupakan kontrol terhadap pemakaian formulir faktur (sekaligus kontrol terhadap terjadinya transaksi). Dengan cara demikian maka dapat dengan mudah melacak formulir faktur yang terpakai namun tidak tercatat suatu transaksi dan personil yang berwenang dapat dimintai keterangan untuk mempertanggungjawabkannya.

H. PRINSIP-PRINSIP PENGENDALIAN PENGELUARAN KAS

Sistem pengendalian intern yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar (bank) ikut serta dalam mengawasi kas organisasi. Untuk pengeluaran kas digunakan cara sebagai berikut:

1. Semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek
2. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek (karena jumlahnya kecil) dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan *imprest fund.*

Aktivitas pengendalian kas yang dapat dirancang untuk sistem pengeluaran kas adalah sebagai berikut:

1. Pemisahan tugas yang cukup

a. ***Fungsi penyimpangan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.***

Unsur pengendalian intern mengharuskan pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi penyimpanan, agar data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dijamin keandalannya.

b. ***Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh Bagian Kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi lain****.*

Unsur sistem pengendalian intern mengharuskan pelaksanaan setiap transaksi oleh lebih dari satu fungsi agar tercipta adanya *internal check.*

2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas; dan dokumen dan catatan yang memadai

a. ***Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi mendapat otorisasi pejabat yang berwenang.*** Transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Berdasarkan bukti kas keluar ini, kas organisasi berkurang dan catatan akuntansi dimutakhirkan *(updated).*

b. ***Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.***

Jika terjadi pembukaan dan penutupan rekening giro organisasi di bank tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang, akan terbuka kemungkinan penyaluran penerimaan kas dari organisasi ke rekening giro yang tidak sah dan pengeluaran kas organisasi untuk kepentingan pribadi pegawai.

3. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

a. ***Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya.***

Saldo kas di tangan,baik yang berupa dana kas kecil atau penerimaan kas dari penjualan tunai dan piutang yang belum disetorkan ke bank, perlu dilindungi dari kemungkinan pencurian dengan cara menyimpannya dalam lemari besi dan menempatkan kasir di suat ruangan yang terpisah.

b. ***Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan (misalnya mesin register kas, almari besi, dan strong room).***

Umumnya fungsi penyimpanan kas ditempatkan dalam suatu ruangan yang tidak setiap pegawai diperkenankan melakukan akses ke dalamnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta dilengkapidengan perlengkapan pengamanan yang memadai.

I. LAPORAN ARUS KAS

a. Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat

Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat adalah salah satu dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di samping Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat disusun oleh Direktorat Informasi dan Akuntansi (DIA) Ditjen Perbendaharaan melalui Sistem Akuntansi Kas Umum Negara /SAKUN (Lihat penjelasan tentang SAKUN di bab 12), yang merupakan konsolidasi dari seluruh fungsi perbendaharaan di Ditjen Perbandaharaan.

Tujuan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, dan juga informasi mengenai saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Manfaat Informasi Arus Kas. Informasi Arus Kas memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Informasi Arus Kas sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya
2. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
3. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

b. Entitas Pelaporan Arus Kas

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Umum Negara (BUN) Indonesia dipegang oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Kuasa Bendaharawan Umum Negara (Kuasa BUN) dipegang oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dir PKN) Dirjen Perbendaharaan. Maka unit organisasi yang

mempunyai fungsi perbendaharaan adalah Departemen Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan.

Jadi entitas pelaporan untuk Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat adalah:

1. KPPN yang menghasilkan LAK - KPPN
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang menghasilkan LAK - Kanwil
3. Direktorat PKN yang menghasilkan LAK - BUN
4. Ditjen Perbendaharaan c.q. DIA yang menghasilkan LAK - PP

c. Klasifikasi Laporan Arus Kas

Berbeda dengan akuntansi komersial yang mengklasifikasikan arus kas menjadi tiga klasifikasi, --yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan,-- akuntansi pemerintah mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 4 klasifikasi:

1. aktivitas operasi,
2. aktivitas investasi aset nonkeuangan,
3. aktivitas pembiayaan,
4. aktivitas dan nonanggaran.

Klasifikasi arus kas ini memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi asset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

d. Pelaporan Arus Kas

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara:

(a) Metode Langsung

Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

(b) Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksitransaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsure pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi asset nonkeuangan dan pembiayaan.

Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang;
b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Pelaporan Arus Kas atas dasar Arus Kas Bersih

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

Arus Kas Mata Uang Asing

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

Bunga Dan Bagian Laba

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah.

Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benarbenar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Perolehan dan Pelepasan Perusahaan Negara/Daerah dan Unit Operasi Lainnya

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.

Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:

a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/Daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Transaksi Bukan Kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.

Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

Pengungkapan Lainnya untuk Arus Kas

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan. Jika apropriasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan basis kas, laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami hubungan antaraktivitas pelaporan atau program dan informasi penganggaran pemerintah.

Daftar Pustaka

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, *Penatausahaan PHLN*, Jakarta: 2005.

Blake, David, *Financial Market Analysis,* McGraw-Hill Book Company Europe, England : 1990

Brigham, F. Eugene; Philip R.Davis, *Intermediate Financial Management,* 7th edition, Thomson Learning Inc., USA : 2002

Dropkin, Murray, Allyson Hayden. *The Cash Flow Management Book for Nonprofits: A Step-byStep Guide for Managers, Consultants, and Boards*. San Francisco: Jossey-Bass. 2001.

MEFMI, *Public Debt Management Procedures Manual Vol. 1*.

Mulyadi. *Sistem Akuntansi.* Ed.3. Jakarta : Salemba Empat.2001

Munawar, Dungtji, *Pengembalian Pinjaman Luar Negeri*, Badan Pendidikan dan elatihan Keuangan, Jakarta: 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

(www.wikipedia.com)